



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan mengacu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas menyebabkan inefisiensi anggaran dan adanya tolak ukur kinerja yang jelas dalam penentuan anggaran serta kewajiban biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Analisa Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Analisa Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2019) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ASB 001 - Pelatihan Non Pegawai-Tanpa Praktek Lapangan;
- b. ASB 002 - Pelatihan Non Pegawai-Dengan Praktek Lapangan;
- c. ASB 003 - Pelatihan Pegawai;
- d. ASB 004 - Pelatihan Pegawai Di Hotel;
- e. ASB 005 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
- f. ASB 006 - Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung;
- g. ASB 007 - Penyuluhan;
- h. ASB 008 - Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- i. ASB 009 - Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- j. ASB 010 - Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan;
- k. ASB 011 - Administrasi Kegiatan Mengikuti Pameran; dan
- l. ASB 012 - Administrasi Kajian Oleh Pihak Ketiga.

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 8 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA

A. ASB-001 PELATIHAN NON PEGAWAI-TANPA PRAKTEK LAPANGAN

Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan kepada masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 165.333,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.0 + (Rp. 165.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	14,85%	100,00%
2	Belanja Jasa Kantor	12,17%	75,59%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	4,86%	29,84%
4	Belanja Makan dan Minum	15,01%	30,02%
5	Belanja Perjalanan Dinas	6,97%	100,00%
6	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	46,14%	97,82%
	Jumlah	100,00%	

Contoh Kegiatan ASB-001:

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Sosial	Bimbingan Bagi Lanjut Usia Produktif
2	Dinas Pertanian	Bimbingan Teknis Tanaman Perkebunan
3	Kecamatan Ujung Pangkah	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
4	Dinas Perikanan	Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
5	Dinas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
6	Kecamatan Cerme	Pelatihan dan Pembinaan
7	Kecamatan Diryorejo	Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa
8	Kecamatan Bungah	Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa
9	Dinas Sosial	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Pelatihan Ekspor dan Kewirausahaan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
12	Kecamatan Gresik	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
13	Dinas Pendidikan	Pelatihan Kader Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan Kepemudaan
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pelatihan Kepramukaan
16	Dinas Sosial	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
17	Kecamatan Manyar	Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	SKPD	Kegiatan
18	Kecamatan Kedamean	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
19	Kecamatan Diryorejo	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
20	Dinas Pendidikan	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
21	Kecamatan Bungah	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)
22	Kecamatan Duduksampeyan	Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Pengurus Desa Tangguh
24	Kecamatan Gresik	Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
25	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
26	Kecamatan Panceng	Pelatihan Dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa [Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pasar Desa, Lembaga Ekonomi Mikro)
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
28	Dinas Sosial	Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
29	Dinas Perikanan	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
30	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

## B. ASB-002 PELATIHAN NON PEGAWAI-DENGAN PRAKTEK LAPANGAN

### Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan praktek lapangan kepada masyarakat.

### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp455.362,00 per peserta per hari pelatihan

### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp455.362,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,87%	1,35%
2	Belanja Bahan Material	33,34%	78,79%
3	Belanja Jasa Kantor	22,51%	41,58%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,23%	4,52%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,66%	4,47%
6	Belanja Makan dan Minum	7,05%	14,11%
7	Belanja Perjalanan Dinas	6,93%	19,92%
8	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	26,40%	54,67%
	Jumlah	100,00%	

Contoh Kegiatan ASB-002:

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
2	Dinas Perikanan	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
3	Dinas Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan/Udang
4	Dinas Perikanan	Pengembangan Diversifikasi Usaha Pembudidaya Ikan
5	Dinas Perikanan	Peningkatan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya
6	Dinas Perikanan	Pembinaan dan Pelatihan Nelayan
7	Dinas Perikanan	Pembinaan Diversifikasi Usaha Bagi Wanita Nelayan
8	Dinas Perikanan	Temu Aplikasi Tehnologi Pengelolaan Hasil Perikanan
9	Dinas Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Peningkatan
10	Dinas Pertanian	Pengembangan Pupuk Organik
11	Dinas Perikanan	Pelatihan Teknologi Penanganan produk Ikan Segar
12	Dinas Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Peningkatan Mutu Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)

C. ASB-003 PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 94.611,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp. 94.611,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13,03%	97,07%
2	Belanja Jasa Kantor	12,80%	85,86%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	16,74%	52,77%
4	Belanja Makan dan Minum	46,43%	92,86%
5	Belanja Perjalanan Dinas	11,00%	51,30%
	Jumlah	100,00%	

Contoh Kegiatan ASB-003:

No	SKPD	Kegiatan
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Badan Kepegawaian Daerah	Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Kepegawaian
4	Kecamatan Kebomas	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Kelurahan
5	Badan Kepegawaian Daerah	Sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis (Bintek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional)

No	SKPD	Kegiatan
6	Kecamatan Kedamean	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
7	Badan Kepegawaian Daerah	Pembinaan Aparatur Negara
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan / Workshop Mengukur Kerugian Sarana Prasarana Pasca Bencana
9	Kecamatan Kebomas	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
10	Kecamatan Balong Panggang	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
11	Kecamatan Sangkapura	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
12	Kecamatan Diryorejo	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
13	Kecamatan Gresik	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
14	Dinas Pendidikan	Pelatihan Inovasi Pembelajaran Mata Pelajaran
15	Dinas Sosial	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Mitigasi Bencana
17	Inspektorat	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
18	Dinas Pendidikan	Pelatihan Proktor Dan Teknisi UNBK SMP Negeri/Swasta
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelatihan Tim Tanggap Bencana (SAR)
20	Dinas Keluarga	Pelatihan <i>Contraceptive Technique</i>

No	SKPD	Kegiatan
	Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<i>Update</i> (CTU) Bagi Bidan
21	Dinas Pertanian	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan/ Peternakan
22	Dinas Pendidikan	Workshop Penilaian Hasil Belajar Siswa Secara <i>Online</i>
23	Dinas Pendidikan	Workshop Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
24	Badan Kepegawaian Daerah	Workshop Sasaran Kerja Pegawai (Program E-SKP)
25	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan SDM dan Performance PPNS Di Kabupaten Gresik
26	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

#### D. ASB-004 PELATIHAN PEGAWAI DI HOTEL

##### Deskripsi:

Pelatihan pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu di hotel pada lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

##### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

##### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

##### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp532.484,00 per peserta per hari pelatihan

##### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp532.484,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11,15%	16,51%
2	Belanja Jasa Kantor	5,04%	15,80%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	13,66%	25,84%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	49,13%	79,62%
5	Belanja Makan dan Minum	5,97%	11,94%
6	Belanja Perjalanan Dinas	15,05%	45,37%
	Jumlah	100,00%	

## Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan Belanja untuk Narasumber yang Berasal Dari Luar Daerah, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD

## Contoh Kegiatan ASB-004:

No	SKPD	Kegiatan
1	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Badan Kepegawaian Daerah	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
3	Badan Kepegawaian Daerah	Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi
4	Badan Kepegawaian Daerah	<i>Achevment Motivation Training</i>
5	Badan Kepegawaian Daerah	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
6	Inspektorat	Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

E. ASB-005 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Organisasi Perangkat Daerah yang dimulai dari persiapan hingga diteruskannya hasil penyusunan buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp313.498,00 per kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp313.498,00 x Jumlah kegiatan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Uang Lembur	36,39%	100,00%
2	Belanja Jasa Kantor	11,16%	88,86%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	34,50%	100,00%
4	Belanja Makan dan Minum	10,58%	21,16%
5	Belanja Perjalanan Dinas	4,43%	68,45%
6	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	2,94%	46,60%
	Jumlah	100,00%	

Contoh Kegiatan ASB 005:

No	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Sosial	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	SKPD	Kegiatan		
2	Dinas Pendidikan	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
8	Kecamatan Benjeng	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
9	Kecamatan Kebomas	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
10	Kecamatan Cerme	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
11	Kecamatan Duduksampeyan	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
12	Kecamatan Ujung Pangkah	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
13	Kecamatan Balong Panggang	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi

No	SKPD	Kegiatan		
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
15	Badan Kepegawaian Daerah	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
16	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
18	Dinas Perhubungan	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
19	Dinas Perikanan	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
20	Dinas Pertanian	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
22	Dinas Tenaga Kerja	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
23	Sekretariat DPRD	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
24	Kecamatan Sangkapura	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyusunan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi

No	SKPD	Kegiatan		
26	Dinas Pertanahan	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
28	Kecamatan Kedamean	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
29	Kecamatan Wringinanom	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
30	Kecamatan Sidayu	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
31	Kecamatan Panceng	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
32	Kecamatan Menganti	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
33	Kecamatan Dukun	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
34	Kecamatan Driyorejo	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
35	Kecamatan Manyar	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
36	Kecamatan Gresik	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi
37	Kecamatan Bungah	Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan dan Ikhtisar	Capaian Realisasi

No	SKPD	Kegiatan
38	Inspektorat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
41	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
42	Dinas Kesehatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
43	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

#### F. ASB-006 SOSIALISASI- TATAP MUKA SECARA LANGSUNG

##### Deskripsi:

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp209.517,00 per peserta per hari sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp209.517,00 x jumlah peserta x jumlah hari sosialisasi).

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,12%	90,64%
2	Belanja Jasa Kantor	7,17%	89,29%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	8,10%	69,68%
4	Belanja Makan & Minum	7,00%	100,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	3,12%	40,22%
6	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	62,49%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Contoh Kegiatan ASB 006:

No.	SKPD	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Gugus
2	Dinas Pendidikan	Sosialisasi dan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sosialisasi Penanggulangan Bencana
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Kepada
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembinaan Satuan Radio Komunikasi
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dan Swasta
7	Kecamatan Cerme	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba
8	Kecamatan Duduksampeyan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

No.	SKPD	Kegiatan
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Bela Negara
10	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Penyuluhan Hukum
11	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sosialisasi Peraturan Daerah
12	Badan Kepegawaian Daerah	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
13	Badan Kepegawaian Daerah	Penguatan dan Peningkatan Kinerja Organisasi
14	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Lokakarya Revolusi Mental
15	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan
16	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sosialisasi Pajak Daerah
17	Dinas Perhubungan	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang
18	Dinas Perhubungan	Sosialisasi Penunjang Angkutan Penyeberangan Diatas Sungai
19	Dinas Perhubungan	Sosialisasi Tentang Perkerataapian
20	Dinas Perikanan	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
21	Dinas Pertanian	Pengembangan Buah Unggulan Lokal Daerah
22	Dinas Pertanian	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi
23	Dinas Pertanian	Sosialisasi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT)
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Desiminasi Dan Penyusunan Rekapitulasi Profil Desa/Kelurahan
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

No.	SKPD	Kegiatan
26	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi Administrasi Kependudukan Petugas Register Desa
27	Kecamatan Kedamean	Verifikasi Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
28	Kecamatan Sidayu	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
29	Kecamatan Sidayu	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
30	Kecamatan Panceng	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
31	Kecamatan Panceng	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa
32	Kecamatan Panceng	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
33	Kecamatan Panceng	Sosialisasi Peraturan Tentang Pelayanan Publik
34	Kecamatan Menganti	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
35	Kecamatan Menganti	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
36	Kecamatan Menganti	Sosialisasi Peraturan Tentang Pelayanan Publik
37	Kecamatan Menganti	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
38	Kecamatan Dukun	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras
39	Kecamatan Driyorejo	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
40	Kecamatan Driyorejo	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
41	Kecamatan Driyorejo	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa
42	Kecamatan Manyar	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
43	Kecamatan Gresik	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	SKPD	Kegiatan
44	Kecamatan Gresik	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Kelurahan
45	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Tlogopatut
46	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Sukodono
47	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Sukodono
48	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Tlogopatut
49	Kecamatan Gresik	Pengelolaan Kelurahan Ngipik
50	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat
51	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat
52	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat
53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan dan Peningkatan Kuaslitas Kawasan
54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BOP Pendataan Penunjang Infrastruktur Permukiman Perdesaan
55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Permukiman
56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan dan Pemeliharaan Psu Kawasan Perumahan yang Merupakan Aset Pemerintah Daerah
57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan dan Peningkatan Kuaslitas Kawasan
60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

## G. ASB-007 PENYULUHAN

### Deskripsi:

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada pegawai atau nonpegawai yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di dalam daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk merubah sikap/perilaku/kebiasaan dari pegawai ataupun non pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp153.923,00 per peserta, per hari

### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp153.923,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,50%	27,13%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,07%	75,79%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	1,18%	13,94%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	24,01%	55,18%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,28%	45,20%
6	5.2.2.28	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	59,96%	78,48%
			100%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	25	180
Jumlah Hari	1	12

Contoh Kegiatan ASB-007:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
1	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Penyuluhan Keamanan Pangan Jasa Boga/Rumah Makan/ Kantin Sekolah
2	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan (Irtg) Di Dinkes Kabupaten-
3	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan (Irtg) Di Dinkes Bawean
4	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Penyuluhan Pembuatan Makanan Tanpa Bahan Tambahan Yang Dilarang
5	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Penyuluhan Keamanan Pangan Di Desa
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular
8	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Kepada	Penyuluhan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Kepada
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pendidikan Pra Nikah	Penyuluhan Pendewasaan Usia
10	Sekretariat Daerah	Penyuluhan Hukum	Penyuluhan Hukum
11	Kecamatan Gresik	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba
12	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangpoh	Penyuluhan Kesehatan (Germas)
13	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik	Penyuluhan Keluarga Berencana
14	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik	Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika
15	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebungson Kecamatan Gresik	Penyuluhan Warga Pada Hidup Sehat Dlm Lingkungan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
16	Kecamatan Gresik	Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kemuteran Kecamatan Gresik	Penyuluhan Bank Sampah
17	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kemuteran	Penyuluhan Dampak Narkoba
18	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kemuteran	Penyuluhan Pengembangan UKM
19	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kemuteran	Penyuluhan Kesehatan (Gizi)
20	Kecamatan Gresik	Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kroman	Penyuluhan Narkoba
21	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lumpur	Penyuluhan Sanitasi Lingkungan
22	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lumpur	Penyuluhan Narkoba
23	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Ngipik	Penyuluhan Narkoba Untuk Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan
24	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat
25	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Narkoba
26	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Antisipasi Dini Kebakaran

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
27	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Pengolahan Sampah
28	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Pembuatan Bunga
29	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Pembuatan Hantaran Lamaran
30	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Melukis Kerudung
31	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Menghias Sandal
32	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Linmas Tentang Keamanan Lingkungan
33	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekauman	Penyuluhan Pembuatan Kue
34	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekelingan	Penyuluhan Antisipasi Dini Kebakaran
35	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pekelingan	Penyuluhan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
36	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Narkoba
37	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Pengolahan Sampah

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
38	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Kb-Kes
39	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan PHBS
40	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Antisipasi Dini Kebakaran
41	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Tentang Pengolahan Markisnya
42	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Bahaya Merokok Bagi Kesehatan
43	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Tentang Gizi Seimbang Pada Balita Dan Lansia
44	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sukorame	Penyuluhan Kesehatan Gigi Dan Mulut
45	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogopatut	Penyuluhan Stunting
46	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogopatut	Penyuluhan Bkb (Buna Keluarga Balita)
47	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tlogopojok	Penyuluhan Kesehatan
48	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Trate	Penyuluhan Kesehatan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
49	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Trate	Penyuluhan PAUD
50	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Trate	Penyuluhan Narkoba
51	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Trate	Penyuluhan Kartar Dan Forum Anak
52	Kecamatan Gresik	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Trate	Penyuluhan Keamanan Lingkungan
53	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gending	Penyuluhan Penyetaraan Gender
54	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gending	Penyuluhan Peningkatan Gizi Keluarga
55	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gulomantung	Penyuluhan Kesehatan Lansia
56	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kawisanyar	Penyuluhan Narkoba
57	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kawisanyar	Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan
58	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kawisanyar	Penyuluhan Stunting
59	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebomas	Penyuluhan Kesehatan
60	Kecamatan Kebomas	Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ngargosari	Penyuluhan Kader Lingkungan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
61	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Ngargosari	Penyuluhan Kader Posyandu Dan Lansia
62	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Ngargosari	Penyuluhan Narkoba
63	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidomukti	Penyuluhan Anti Narkoba
64	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidomukti	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
65	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Singosari	Penyuluhan Minuman Sehat
66	Kecamatan Kebomas	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tenggulunan	Penyuluhan Deteksi Dini Gejala Kanker
67	Kecamatan Kebomas	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
68	Kecamatan Kebomas	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
69	Kecamatan Kedamean	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
70	Kecamatan Menganti	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
71	Kecamatan Sidayu	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
72	Kecamatan Ujung Pangkah	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
73	Kecamatan Dukun	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba

#### H. ASB-008 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

##### Deskripsi:

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD untuk menyusun rencana kerja di SKPD masing-masing untuk satu periode pelaporan. Kegiatan tersebut dimulai dari tahap persiapan sampai diserahkan laporan rencana kerja SKPD.

##### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah kegiatan SKPD

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp9.107.111,00 per kegiatan penyusunan renja

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp283.612,00 per kegiatan SKPD

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp9.107.111,00 + (Rp283.612,00 x jumlah kegiatan SKPD)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,41%	24,27%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,69%	51,52%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,59%	70,40%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	32,59%	97,00%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,39%	67,39%
6	5.2.2.28	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	8,33%	33,92%
			100%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Kegiatan	17	120

Contoh Kegiatan ASB-008:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
1	Badan Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
3	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
7	Dinas Kesehatan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
10	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
11	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
15	Dinas Pendidikan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
16	Dinas Perhubungan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
17	Dinas Perikanan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
19	Dinas Pertanahan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
20	Dinas Pertanian	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
21	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
23	Dinas Sosial	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
24	Dinas Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
25	Inspektorat	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
26	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
27	Kecamatan Balong Panggang	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
28	Kecamatan Benjeng	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
29	Kecamatan Bungah	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
30	Kecamatan Cerme	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
31	Kecamatan Driyorejo	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
32	Kecamatan Duduksampeyan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
33	Kecamatan Dukun	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
34	Kecamatan Gresik	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
35	Kecamatan Kebomas	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
36	Kecamatan Kedamean	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
37	Kecamatan Manyar	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
38	Kecamatan Menganti	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
39	Kecamatan Panceng	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
40	Kecamatan Sangkapura	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
41	Kecamatan Sidayu	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
42	Kecamatan Tambak	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
43	Kecamatan Ujung Pangkah	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
44	Kecamatan Wringinanom	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
45	Sekretariat DPRD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD

## I. ASB-009 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

### Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD untuk menyusun laporan keuangan di SKPD masing-masing untuk satu periode pelaporan. Kegiatan tersebut dimulai dari tahap persiapan sampai diserahkan laporan keuangan SKPD.

### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah kegiatan SKPD

### Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan penyusunan laporan keuangan

### Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp377.067,00 per kegiatan SKPD

### Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp377.067,00 x jumlah kegiatan SKPD)

Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,96%	16,97%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,34%	43,17%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	28,19%	56,79%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	37,84%	78,84%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,67%	67,68%
			100%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Kegiatan	24	82

Contoh Kegiatan ASB-009:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
3	Dinas Perhubungan	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
4	Dinas Pertanian	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
6	Dinas Sosial	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
7	Inspektorat	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
8	Kecamatan Balong Panggang	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
9	Kecamatan Cerme	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
10	Kecamatan Duduksampeyan	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
11	Kecamatan Dukun	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
12	Kecamatan Gresik	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
13	Kecamatan Kebomas	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
14	Kecamatan Kedamean	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
15	Kecamatan Manyar	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
16	Kecamatan Menganti	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
17	Kecamatan Panceng	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
18	Kecamatan Tambak	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
19	Kecamatan Ujung Pangkah	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
20	Sekretariat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan
21	Sekretariat DPRD	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan

J. ASB-010 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN  
KECAMATAN

Deskripsi:

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam hal ini adalah kecamatan, untuk membahas bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan rencana pembangunan untuk satu periode selanjutnya. Kegiatan ini tidak termasuk untuk penyusunan atau penginputan e-planning.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp187.435,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp187.435,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,82%	17,54%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,00%	3,84%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	4,48%	10,85%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	23,05%	42,73%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,24%	27,61%
6	5.2.2.28	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	51,41%	66,10%
			100%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Peserta	48	300
Jumlah Hari	1	2

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan:

1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Contoh Kegiatan ASB-010:

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
1	Kecamatan Gresik	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
2	Kecamatan Kebomas	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
3	Kecamatan Manyar	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
4	Kecamatan Cerme	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
5	Kecamatan Benjeng	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
6	Kecamatan Balong Panggang	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
7	Kecamatan Duduksampeyan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
8	Kecamatan Driyorejo	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
9	Kecamatan Wringinanom	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
10	Kecamatan Kedamean	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
11	Kecamatan Menganti	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
12	Kecamatan Sidayu	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
13	Kecamatan Ujung Pangkah	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
14	Kecamatan Panceng	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas Teridentifikasi
15	Kecamatan Bungah	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
16	Kecamatan Dukun	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
17	Kecamatan Sangkapura	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
18	Kecamatan Tambak	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

#### K. ASB-011 ADMINISTRASI KEGIATAN MENGIKUTI PAMERAN

##### Deskripsi:

Administrasi kegiatan mengikuti pameran merupakan administrasi yang disediakan untuk mendukung pekerjaan berupa keikutsertaan pada sebuah kegiatan pameran. Kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan sampai selesainya kegiatan pameran tersebut.

##### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai sewa stand, kebutuhan dekorasi, dan perlengkapan dekorasi

##### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

##### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

3,2140 x nilai pengadaan untuk Rp1	sampai dengan Rp5.000.000
2,2523 x nilai pengadaan untuk Rp5.000.001	sampai dengan Rp10.000.000

1,8293 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.000	Rp10.000.001	sampai dengan
1,5783 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.000	Rp50.000.001	sampai dengan
1,4076 x nilai pengadaan untuk	> Rp100.000.000	

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pameran:

No.	Nilai Sewa Pameran (X)	Pagu Belanja (Y)
1	1 < X < 5.000.000	Y = 3,2140 X
2	5.000.000 < X < 10.000.000	Y = 2,2523 X
3	10.000.000 < X < 50.000.000	Y = 1,8293 X
4	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 1,5783 X
5	100.000.000 < X	Y = 1,4076 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,93%	33,31%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18,29%	50,98%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Penggandaan	26,68%	97,64%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	6,55%	43,61%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,06%	87,56%
6	5.2.2.28	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	3,49%	31,20%
			100,00%	

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan:

1. Belanja Bahan/Material
2. Belanja Pakaian dan Atributnya

3. Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Contoh Kegiatan ASB-011:

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pembinaan Dan Fasilitasi Rumah Umum	Mengikuti Pameran
2	Dinas Tenaga Kerja	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas Dan Pelatihan Kewirausahaan	Mengikuti Pameran
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Mengikuti Pameran
4	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Engembangan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Keluarga Sejahtera	Mengikuti Pameran
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM)	Mengikuti Pameran
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Promosi Investasi	Mengikuti Pameran
7	Dinas Perikanan	Pertemuan Pelayanan Usaha	Mengikuti Pameran

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
8	Dinas Pertanian	Lomba Dan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Mengikuti Pameran
9	Kecamatan Gresik	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Dan Menengah	Mengikuti Pameran
10	Kecamatan Kebomas	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Dan Menengah	Mengikuti Pameran
11	Kecamatan Balong Panggang	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Dan Industri Menengah	Mengikuti Pameran

#### L. ASB-012 ADMINISTRASI KAJIAN OLEH PIHAK KETIGA

##### Deskripsi:

Administrasi kajian oleh pihak ketiga merupakan administrasi yang disediakan untuk mendukung pekerjaan berupa kajian yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga/konsultan. Kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan sampai diserahkannya laporan hasil kajian tersebut.

##### Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Nilai jasa konsultansi/ pihak ketiga

##### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

##### Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,1725 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.000	Rp1	sampai dengan
1,1233 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.000	Rp50.000.001	sampai dengan
1,0945 x nilai pengadaan untuk Rp500.000.000	Rp100.000.001	sampai dengan

1,0741 x nilai pengadaan untuk Rp500.000.001 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,0582 x nilai pengadaan untuk >Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian Oleh Pihak Ketiga:

No.	Nilai Sewa Pameran (X)	Pagu Belanja (Y)
1	1 < X < 50.000.000	Y = 1,1725 X
2	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 1,1233 X
3	100.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,0945 X
4	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0741 X
5	1.000.000.000 < X	Y = 1,0582 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,30%	35,21%
2	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,97%	26,14%
3	5.2.2.06	Belanja Cetak & Pengandaan	13,02%	64,79%
4	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	31,33%	100,00%
5	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,20%	90,93%
6	5.2.2.28	Belanja Kehadiran Peserta Non PNS	11,19%	63,77%
			100,00%	

Contoh Kegiatan ASB-012:

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Kajian Masterplan Kawasan Kumuh Dan Non Kumuh	Kajian Masterplan Kawasan Kumuh Dan Non Kumuh

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
2	Dinas Perhubungan	Study Identifikasi Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Study Identifikasi Sarana Dan Prasarana Perhubungan
3	Dinas Perhubungan	Study Penyelenggaraan Pelayanan Parkir	Study Penyelenggaraan Pelayanan Parkir
4	Dinas Perhubungan	Kajian Lalu Lintas Simpang Sebidang	Kajian Lalu Lintas Exit Tol Klbm 1
5	Dinas Perhubungan	Kajian Blackspot/Titik Rawan Kecelakaan	Kajian Blackspot/Titik Rawan Kecelakaan
6	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusunan Jaringan Kemitraan Untuk Perluasan Investasi Usaha Kecil	Kajian Pihak Ketiga
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Kajian Kebijakan Penanaman Modal
8	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Penyusunan Kajian Karya Budaya Daerah
9	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air	Kajian Crm Dan Pengembangan Kota Tua Gresik
10	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Pendukung Pengelolaan Museum Dan Taman Budaya Di Daerah	Kajian Dan Pendokumentasian Naskah Koleksi Museum

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
11	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
12	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	Kajian Strategis Daerah	Kajian Inkubasi Sistem Inovasi Daerah
13	Sekretariat DPRD	Peningkatan Peran Dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Peningkatan Peran Dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah
14	Sekretariat Daerah	Penegasan Batas Daerah	Penyusun Kajian Dan Draf Perbup
15	Sekretariat Daerah	Penegasan Batas Daerah	Jasa Konsultasi Penegasan Batas Daerah
16	Sekretariat Daerah	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Kajian Pengembangan Pengelolaan Persampahan
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	Studi Kelayakan Sumber Air Baku Alternatif Sumber Air Bagi HIPPAM Di Kec Balongpanggang Bagian Utara
18	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	Studi Kelayakan Sumber Air Baku Alternatif Sumber Air Bagi HIPPAM Di Kec

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
			Balongpanggung Bagian Selatan
19	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	Studi Kelayakan Sumber Air Baku Alternatif Sumber Air Bagi Hippam Di Kec Benjeng
20	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Studi Kelayakan Tpst Gresik Utara
21	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	Studi Perencanaan Pembangunan Kesra	Studi Perencanaan Pembangunan Kesra
22	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	Studi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Mental Dan Budaya	Studi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Mental Dan Budaya
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	Studi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah	Studi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah
24	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	Studi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup	Studi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Aktivitas
26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Pengembangan Data Dan Informasi Sumber Daya Air	Pengembangan Data Dan Informasi Sumber Daya Air

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.